

IMPLEMENTASI JURNALISME PERSPEKTIF GENDER PADA PEMBERITAAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MEDIA ONLINE

Almira Khairunnisa, Nurul Hasfi, Adi Nugroho

khairunnisaalmiraa@gmail.com

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Women are the gender group that dominates the number of migrant workers in Indonesia. The significant increase in the number of women among migrant workers is directly proportional to the increase in the number of cases experienced by migrant workers. Online media as a provider of public space to monitor the power and representation of minorities should be able to provide news with a positive climate for women through the implementation of gender perspective journalism.

The results of the research show that online media in Indonesia has implemented most of the gender perspective journalism indicators through the proportion of sensational diction in news titles, the proportion of news bodies that meet the journalistic code of ethics adopted from articles 4, 5 and 8, the proportion of diction used in body of news, and the proportion of female and male sources in the news. Of the 63 news stories analyzed, 39 news stories (61.9%) had titles that contained some sensationalist diction, 33 news stories (52.4%) had implemented a journalistic code of ethics that was relevant to gender perspective rules, and 30 news stories (47.6%) had used diction that gender perspective. In the resource element, the research results showed that 60.5% of the resource persons were male, while 39.5% of the resource persons were female.

However, the number of categories implementing some indicators and implementing all indicators is not significantly different in the category of using stereotypical diction in news titles and body of news. Thus, online media has a record of creating a more balanced proportion of reporting in terms of diction selection.

Keywords: online media, gender perspective journalism, female migrant workers

Keywords: online media, gender perspective journalism, female migrant worker

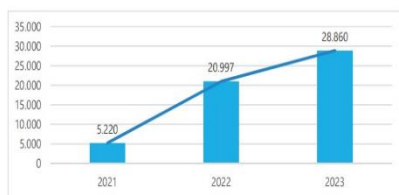
PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara dengan jumlah pekerja migran terbesar di Asia. Hal ini selaras dengan catatan dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa negara Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia setelah China dan Filipina.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, seseorang dikatakan menjadi seorang pekerja migran apabila orang tersebut bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, hingga pelaut awal kapal dan pelaut perikanan.

Setiap tahunnya, jumlah pekerja migran asal Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2023), sebanyak 215.779 pekerja migran telah ditempatkan hingga September 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada September 2022, jumlah pekerja migran yang ditempatkan adalah 21.724 orang, sedangkan pada September 2023, jumlah tersebut meningkat sebesar 12% menjadi 24.412 orang.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia periode tahun 2021, 2022, 2023 (September)



TAHUN	JUMLAH	TREN
2021 (September)	6.320	
2022 (September)	21.724	▲ 244 % Kenaikan dari 2021
2023 (September)	24.412	▲ 12 % Kenaikan dari 2022

Gambar 1.1 jumlah penempatan pekerja migran Indonesia periode September 2021 – 2023 (Sumber: BP2MI, 2023)

Pekerja migran Indonesia paling banyak ditempatkan di sektor informal dengan jumlah sebanyak 13.560 orang atau 56% dari total keseluruhan. Pekerjaan yang digolongkan ke dalam sektor informal salah satunya ialah asisten rumah tangga (ART) dan *domestic worker*. Sementara itu, pekerja migran yang ditempatkan di sektor formal menyentuh angka 10.852 atau 46% dari total keseluruhan. Jenis pekerjaan pada sektor ini

ialah perusahaan berbadan hukum yang memiliki kontrak kerja, seperti pekerjaan di bidang manufaktur, perikanan, kesehatan, dan sebagainya.

Mayoritas pekerja migran Indonesia ditempatkan di kawasan Asia dan Afrika, dengan jumlah mencapai 202.089 orang atau 93,6% dari total penempatan. Di kawasan Eropa dan Timur Tengah, terdapat 12.503 pekerja migran atau 5,8% dari total penempatan. Sementara itu, kawasan Amerika dan Pasifik menerima 1.187 pekerja migran, yang mewakili 0,6% dari total penempatan.

Figur pekerja migran di Indonesia sendiri didominasi oleh perempuan. Berdasarkan data dari BP2MI per September 2023, perempuan merupakan mayoritas pekerja migran, dengan jumlah mencapai 16.547 orang atau 68% dari total pekerja migran. Sebaliknya, pekerja migran laki-laki berjumlah 7.865 orang, atau 32% dari total keseluruhan. Data yang sama juga menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak diemban oleh pekerja migran pada September 2023 adalah *caregiver* dengan total 21.171 pekerja. Pekerjaan lainnya meliputi *worker* sebanyak 13.282 orang, dan house maid di peringkat ketiga dengan jumlah 5.520 pekerja. Dominasi perempuan dalam sektor ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan khusus yang mereka hadapi.

JENIS KELAMIN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	JUMLAH
Laki-Laki	10.273	11.171	9.634	5.697	9.424	7.756	9.807	10.542	7.865	82.169
Perempuan	13.742	13.618	14.634	10.665	16.554	12.632	16.772	18.446	16.547	133.610
Jumlah	24.015	24.789	24.268	16.362	25.978	20.388	26.579	28.988	24.412	215.779

Gambar 1.2 Jumlah pekerja migran di Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 (Sumber: BP2MI).

Data Penerbitan SIP2MI Tahun 2023 (s.d September) Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Jabatan yang disetujui

NO	JABATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	JUMLAH
1	Caregiver	12.412	9.813	4.257	26.818	101.308	34.082	20.707	28.076	21.711	272.487
2	Worker	4.778	4.412	4.633	27.732	57.918	17.431	14.304	16.808	11.282	140.443
3	House Maid	2.550	7.334	4.142	3.526	11.381	4.072	7.738	6.271	5.520	62.328
4	Plantation Worker	1.965	2.050	1.335	1.894	5.097	1.880	2.274	1.022	3.445	21.482
5	Household And Family Cook	1.829	1.361	442	618	1.864	1.850	2.487	2.708	2.119	14.438
6	Restaurant Worker	375	265	438	1.611	7.200	2.365	1.979	2.061	1.982	23.222
7	Domestic Worker	2.279	2.276	881	405	2.549	2.375	3.781	3.777	1.935	19.472
8	Domestic Helper	1.281	858	503	3.763	8.469	3.376	3.314	2.328	1.919	24.682
9	Baby Sitter (informal)	1.255	1.262	523	436	1.822	1.200	2.140	2.333	1.563	11.939
10	Construction Worker	1.054	997	2.371	2.151	2.032	2.419	2.314	2.165	1.442	18.424
11	Elderly Caretaker	1.028	970	482	482	1.081	1.120	2.113	2.154	1.524	11.310
12	Caregiver (production)	1.046	2.049	2.058	2.186	487	26	2.276	2.078	345	17.087
13	Healthcare Assistant	10	100	0	0	1.697	2.851	2.276	1.738	500	7.052
14	Domestic Worker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	General Worker	589	225	331	64	446	1.006	593	639	439	4.397
16	Fisherman	437	374	50	780	1.320	977	845	565	429	5.702
17	Agricultural Labourer	345	315	396	275	477	266	495	303	307	2.807
18	Restaurant Worker	274	81	448	0	72	186	229	59	102	1.702
19	Peraway	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
20	Female Cleaner	60	248	0	0	0	0	200	160	250	618
21	Cleaning Service	397	331	163	80	125	727	410	244	275	2.892
22	Other Workers Doing Simple Job Industry	1.199	398	231	130	412	116	424	210	167	3.287
23	Factory Worker	0	80	210	0	2	2	420	0	162	862
24	Lainnya	6.914	3.162	1.822	2.460	2.844	1.502	2.838	2.937	2.056	26.614
Jumlah	90.594	38.602	24.384	74.582	209.770	65.378	83.818	77.742	62.489	709.205	

Gambar 1.3 Sebaran jabatan pekerja migran di Indonesia pada tahun 2023 (Sumber: BP2MI).

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 mengungkapkan data dari tujuh organisasi masyarakat sipil di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu temuan menunjukkan bahwa terdapat 298 kasus buruh migran perempuan yang telah menikah, sementara 75 orang berstatus cerai. Data ini konsisten dengan laporan BP2MI tentang penempatan pekerja migran Indonesia per September 2023 berdasarkan status pernikahan. Mayoritas pekerja migran berstatus menikah, dengan jumlah 11.775 orang, diikuti oleh 8.732 orang yang berstatus belum menikah, dan 3.905 orang yang berstatus cerai.

Hasil survei dari Migrant CARE menegaskan bahwa mayoritas buruh migran berperan sebagai istri dan anggota keluarga mencapai 51%, sementara 85% sisanya adalah buruh migran perempuan yang sudah menjadi ibu. Data ini menggambarkan kontribusi perempuan sebagai pencari nafkah dalam struktur keluarga. Namun, kerentanan yang dihadapi buruh migran perempuan diperkuat oleh status ganda mereka sebagai pencari nafkah dan anggota keluarga, yang mencerminkan ketidakadilan gender dalam masyarakat.

MARITAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
Menikah	10.971	11.555	11.665	8.008	11.926	9.210
Belum Menikah	10.537	10.396	9.434	5.974	10.471	8.415
Cerai	2.507	2.838	3.169	2.380	3.581	2.763
Jumlah	24.015	24.789	24.268	16.362	25.978	20.381

Gambar 1. 4 Data status pernikahan pekerja migran di Indonesia per September 2023. (Sumber: BP2MI).

Menurut laporan dari VOA Indonesia, Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, menyampaikan bahwa buruh migran perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Data yang disajikan oleh Migrant Care menunjukkan bahwa 5 dari 10 pekerja mengalami kekerasan seksual selama bekerja ("Darurat Kekerasan Seksual di Balik Dunia PRT Migran dan Domestik." (2021, 22 Desember). Voaindonesia.com).

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam ranah publik adalah kekerasan yang dialami oleh buruh migran perempuan di tempat kerja luar negeri dengan total aduan mencapai 6 kasus. Sementara itu, menurut Risalah Kebijakan Perempuan Pekerja Migran (2019), Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun

2014 mencatat sebanyak 226 kasus kekerasan terhadap buruh migran perempuan, mulai dari masa perekrutan hingga kepulangan.

Dari segi regulasi, konflik yang dihadapi oleh buruh migran perempuan sering kali disebabkan oleh kurangnya perlindungan hukum yang mengakibatkan minimnya jaminan bagi mereka, seperti yang terlihat dalam ketidakadaan payung hukum yang meminimalisasi perlindungan bagi buruh migran perempuan, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Meskipun telah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pasca mengalami stagnasi selama 18 tahun, RUU PPRT masih terus menjadi perjuangan para aktivis dan pekerja rumah tangga untuk diakui sebagai sarana perlindungan yang penting bagi mereka. RUU ini dianggap sebagai sarana penting untuk memberikan jaminan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia serta melindungi pekerja migran Indonesia di sektor rumah tangga (Muliawati, 2023).

Media massa merupakan pilar keempat dalam demokrasi, dengan fungsi idealnya yang terdiri dari lima elemen, termasuk memberikan ruang publik untuk pemantauan kekuasaan dan representasi kaum minoritas (Kovach, Rossentiels dalam Andreas, 2010:26). Dengan demikian, perannya sangat penting dalam menyajikan peristiwa kepada masyarakat dengan cara yang akurat dan memadai, sehingga masyarakat dapat menerima informasi sesuai dengan realitas lapangan.

Pemberitaan media massa masih memiliki beberapa catatan dalam konteks liputan mengenai buruh migran perempuan. Hal ini dicerminkan dari bagaimana media masih sering kali memproduksi berita yang tidak mencerminkan realitas sebenarnya dalam kehidupan masyarakat (Rustanta, 2021:5).

Tabel 1.1 Jumlah pemberitaan buruh migran perempuan di lima media online yang paling banyak dikonsumsi masyarakat menurut Similarweb.com tahun 2023

No.	Media	Total
1.	Detik.com	46 berita
2.	Kompas.com	32 berita
3.	CNN	10 berita
4.	Tribunnews	37 berita

(Sumber: Data Primer Peneliti).

Data dalam tabel tersebut menunjukkan frekuensi liputan mengenai buruh migran perempuan oleh empat media online terkemuka di Indonesia mengacu pada laporan Digital News Report 2022 oleh Reuters Institute. Hasilnya menunjukkan bahwa media online Indonesia cukup aktif dalam meliput berbagai isu yang berkaitan dengan buruh migran perempuan, termasuk kekerasan fisik oleh majikan, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan pelanggaran prosedur keberangkatan.

Isu-isu yang lekat dalam keseharian buruh migran perempuan memerlukan upaya media untuk mengakomodasi permasalahan tersebut sebagai pihak yang memiliki peran signifikan dalam menetapkan agenda sosial dan politik menjadi isu krusial yang membutuhkan pemusatan perhatian dari masyarakat (Rosdalina & Kartika, 1999 dalam Yayasan Bakti, 2017).

Media seyogyanya mengimplementasikan upaya tersebut dengan menyediakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan untuk memperbaiki representasi perempuan dengan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk menjadi tokoh yang positif, menggunakan narasumber yang tepat, dan memperhatikan sensitivitas gender dalam informasi yang disajikan. Namun, sebagian aktivis perempuan dan akademisi yang berfokus pada media dan feminisme masih mengkritik bahwa media online belum secara optimal melaporkan isu-isu perempuan, terutama karena penekanan pada model jurnalisme objektif (Yayasan Bakti, 2017). Namun, sejumlah kalangan dari aktivis perempuan hingga akademisi yang berfokus pada media dan feminisme kerap melihat bahwa media-media *online* belum memberitakan isu terkait perempuan secara

optimal yang disebabkan oleh penerapan model jurnalisme objektif.

Jurnalisme objektif adalah cara penyajian berita yang bertujuan untuk memberikan informasi dengan adil dan tidak memihak. Dalam jurnalisme objektif, wartawan berusaha untuk menyajikan fakta tanpa memasukkan opini pribadi, bias, atau interpretasi subjektif. Tujuannya adalah menyajikan berita sehingga pembaca atau penonton dapat membentuk opini sendiri berdasarkan fakta yang diberikan. Westerstahl (1983) menekankan bahwa faktualitas dan imparialitas merupakan aspek penting dalam jurnalisme objektif.

Penerapan jurnalisme objektif sering kali menyebabkan penyampaian pandangan suatu masalah menjadi luput karena praktik tersebut lebih memprioritaskan nilai-nilai yang objektif untuk menjaga independensi, daripada menunjukkan sikap keberpihakan. Terutama dalam pemberitaan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan kelompok-kelompok marginal, media sering kali hanya menghadirkan perspektif dari narasumber yang didominasi oleh pandangan maskulin.

Byerly dan Ross (2006) memandang bahwa banyak media yang cenderung menyajikan penggambaran objektif melalui sudut pandang laki-laki yang dapat berpotensi memberikan berdampak negatif pada perempuan sebab perempuan menjadi tidak direpresentasikan dengan sempurna pada pemberitaan. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali tak terwakili secara proporsional dalam liputan media.

Naomi Wolf (2013), dalam karyanya "Fire with Fire", mengungkapkan bahwa media massa dapat memperkuat ketidakadilan terhadap perempuan melalui apa yang disebutnya sebagai "*apartheid gender*". *Apartheid gender* terjadi ketika proses seleksi, penafsiran, dan penyajian informasi oleh media mampu menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan.

Pemberitaan tentang buruh migran perempuan, yang sering kali menyoroti isu-isu seperti TPPO, kekerasan, penipuan, dan sebagainya, dapat mengakibatkan praktik *apartheid gender* jika media massa tidak memberikan liputan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kode etik yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk memainkan peran aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi

kaum perempuan, termasuk dalam konteks buruh migran perempuan, melalui penekanan pada perspektif gender dalam pelaporan berita. Dengan demikian, konsep jurnalisme dengan perspektif gender menjadi relevan dan penting bagi media dalam menyajikan informasi terkait buruh migran perempuan.

Luputnya pengimplementasian indikator jurnalisme perspektif gender pada pemberitaan buruh migran perempuan dapat memperkuat ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam hal buruh migran perempuan, kemungkinan besar narasi yang bias gender telah menjadi hal umum dalam media massa. Akibatnya, perempuan tidak diwakili secara proporsional di berbagai sektor media, termasuk industri hiburan dan industri berita (Rustanta, 2016).

Salah satu indikator dalam jurnalisme perspektif gender menitikberatkan pada penggunaan diksi dalam pemberitaan. Panduan liputan berperspektif gender dari Yayasan Bakti (2017) menyarankan beberapa penggunaan kata-kata yang disarankan dan tidak disarankan. Dalam konteks liputan mengenai buruh migran perempuan, masih banyak penggunaan kata-kata yang tidak disarankan, seperti PSK, janda, pekerja malam, dan sebagainya, yang masih umum digunakan oleh media massa.

Menurut penelitian Sarwono (2011) tentang analisis framing pemberitaan mengenai kekerasan terhadap buruh migran perempuan di beberapa media, seperti Kompas, Media Indonesia, dan Republika, disimpulkan bahwa media masih menunjukkan sikap pesimis terhadap respons pemerintah terhadap kasus buruh migran perempuan. Selain itu, terdapat ketidakproporsionalan dalam penggunaan narasumber perempuan, yang cenderung lebih minim daripada narasumber laki-laki. Hal ini menandakan kurangnya representasi dan dukungan media terhadap buruh migran perempuan. Narasumber laki-laki juga cenderung berfokus pada bidang sekunder seperti politik, hukum, dan ekonomi, sementara narasumber perempuan lebih fokus pada upaya penyelamatan dan perlindungan buruh migran perempuan. Secara keseluruhan, penelitian tersebut menemukan bahwa media cenderung mendramatisir liputan mengenai buruh migran perempuan, sehingga diperlukan

upaya lebih lanjut dalam menggalakkan implementasi jurnalisme perspektif gender dalam produksi berita untuk memastikan pemberitaan lebih inklusif dan progresif terhadap perempuan sebagai buruh migran.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa media masih menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai buruh migran. Ini tercermin dari narasi pemberitaan yang cenderung mengandung bias gender, dramatisasi yang berlebihan terhadap perempuan, serta dominasi narasumber laki-laki dalam setiap liputan.

J. D'Heer et al., (2019) meninjau riset-riset terdahulu yang menyatakan bahwa aktor perempuan yang merepresentasikan isu tertentu dalam pemberitaan sering kali diremehkan atau distereotipkan. Pertama, laki-laki mendominasi ruang diskusi terkait dengan pemberitaan di media massa karena dipercaya sebagai sosok yang lebih informatif dan otoriter, sementara perempuan lebih diposisikan pada sudut pandang personal, seperti menjadi saksi mata atau voxpop. Kemudian, perempuan kerap kali digambarkan secara tidak proporsional dalam peran keluarga, seperti ibu rumah tangga, sementara laki-laki digambarkan pada profesi yang lebih kompleks, seperti pebisnis atau ahli hukum. Perempuan juga sering kali difokuskan pada hal yang personal, seperti umur, status pernikahan, dan aspek lain yang dapat berujung pada stigmatisasi.

Sejatinya, buruh migran perempuan memiliki diversifikasi representasi dalam pemberitaan di media massa. UN Women (2017) mengklasifikasikan representasi buruh migran perempuan pada pemberitaan menjadi tiga, yakni buruh migran sebagai pahlawan, ancaman, serta korban. Sering kali identifikasi buruh migran perempuan pada kategori tersebut ditandai dengan adanya sensasionalisme, stereotip gender, serta distorsi yang dapat berdampak negatif terhadap strategi mitigasi (Brennan, 2005). Pengidentifikasian buruh migran perempuan sebagai pahlawan juga memiliki tendensi adanya pengabaian hak asasi manusia dan perempuan serta dampak sosial terkait dengan keuangan sehingga mengabaikan kerentanan mereka dalam hal lain.

Dari hal tersebut, pemahaman masyarakat terkait buruh migran perempuan menjadi tanggung jawab media melalui pemberian informasi untuk dapat membentuk

opini publik yang dapat berpengaruh pada kebijakan suatu negara dalam memberikan hak dan perlindungan kepada kelompok buruh migran perempuan. Untuk memerangi adanya diskriminasi dan pembentukan stereotip pada buruh migran perempuan, peran media dalam menyusun narasi dan wacana yang lebih responsif terhadap gender dibutuhkan dalam praktik peliputan terkait buruh migran perempuan melalui implementasi jurnalisme perspektif gender.

Secara kuantitatif, berbagai media *online* telah meliput isu buruh migran perempuan dengan jumlah yang tidak sedikit dengan isu yang beragam mulai dari TPPO, kekerasan, penipuan, deportasi, dan lainnya. Meskipun demikian, isu perempuan dan pekerja migran belum menjadi isu primadona yang diangkat oleh media (**Jaring, 2019**). Padahal, kasus tidak menyenangkan kerap mengiringi perjalanan mereka selama menjadi buruh migran perempuan. Perempuan, buruh migran, hingga buruh migran perempuan sekalipun tak jarang direpresentasikan secara negatif oleh media sebab media memiliki tendensi untuk meliput berita yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif (Utami, 2022).

Dilansir dari Jaring.id dalam tulisannya bertajuk “Peran Jurnalis Perempuan Minim dalam Keredaksian Media”, isu perempuan yang termarginalkan dari pemberitaan kerap membuat pemerintah dan masyarakat tidak mengetahui secara pasti langkah dan sikap yang harus diambil ketika terjadi hal tidak menyenangkan yang menimpa perempuan. Hal tersebut terjadi karena media belum menempatkan isu buruh migran perempuan sebagai prioritas. Masih banyak media yang hanya mengangkat kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan substansinya pada konteks isu perempuan. Dengan demikian, media massa digadang-gadang dapat mempublikasikan persoalan buruh migran perempuan untuk mengubah pandangan publik dan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan dan kebijakan yang ramah terhadap perempuan, khususnya yang bekerja sebagai buruh migran.

Cerita Lengkap TKW Cianjur Pergi ke Dubai hingga Dijebak Jadi PSK

Bima Bagaskara - detikJabar

Gambar 1. 5 Artikel buruh migran perempuan di media online Detik.com

Berita tersebut menyajikan informasi soal seorang perempuan dari Kabupaten Cianjur yang merupakan seorang korban TPPO serta dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Dubai akibat dikejutkan oleh sang teman. Kasus ini mencuat setelah dua anak kandung korban membuat video permintaan tolong kepada Kapolri untuk mengusut kasus sang ibu. Adapun hal menarik yang penulis amati dari pemberitaan tersebut adalah terkait dengan dominasi narasumber laki-laki yang ada pada berita serta nihilnya informasi dari dua pihak antara pihak yang mewakili korban dan pelaku. Selain itu, penggunaan kata PSK juga bukan menjadi diksi yang disarankan dalam peliputan yang sensitif gender jika mengacu pada etika jurnalisme perspektif gender.

Berita Regional

Terlibat TPPO, Perempuan Semarang Rayu 15 Pekerja Migran Ilegal Jadi Pemetik Buah Bergaji Tinggi

Gambar 1. 6 Artikel buruh migran perempuan di media online Tribunnews

Berita di atas merupakan berita terkait buruh migran perempuan dari media *online* Tribunnews dan Kompas.com yang memiliki kesamaan pembahasan, yakni isu penipuan buruh migran perempuan yang linear dengan isu TPPO.

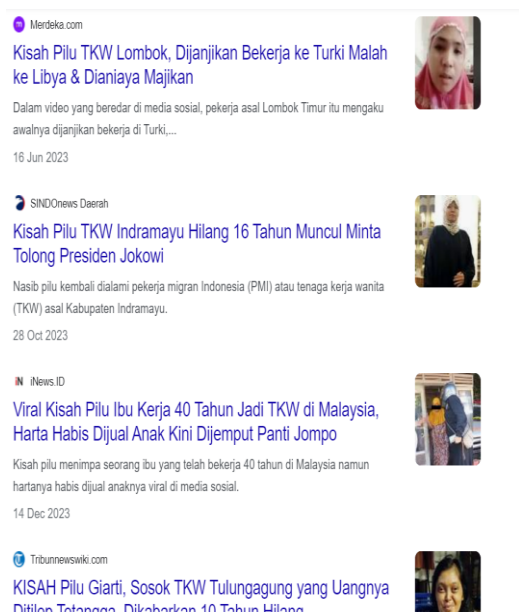
Berita pertama dari Tribunnews menyajikan informasi terkait dengan TPPO yang didalangi oleh sepasang suami istri. Hal ini dituliskan dalam kalimat:

“...Tindak kejahatan itu juga dibantu suaminya yang berada di Selandia Baru untuk memudahkan aksinya.

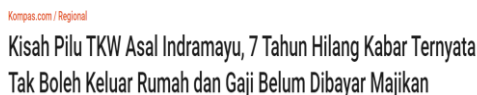
Suami istri itu bekerja sama untuk mendatangkan pekerja migran dari Indonesia untuk dipekerjakan di New Zealand.”

Namun, penulis melihat bahwa penggunaan diksi “Perempuan Semarang” dalam judul berita seolah ‘menunjuk’ bahwa perempuan tersebut merupakan

pelaku tunggal dalam aksi TPPO tersebut, padahal perempuan tersebut juga memiliki kaki-tangan. Ini merupakan salah satu contoh penerapan bias gender dalam pemberitaan buruh migran perempuan.



Gambar 1. 7 Pemberitaan Buruh Migran Perempuan di sejumlah media dengan penggunaan diksi “Kisah Pilu” sebagai judul



Gambar 1. 8 Pemberitaan Buruh Migran Perempuan di sejumlah media dengan penggunaan diksi “Kisah Pilu” sebagai judul

Banyak media *online* yang menyorot soal bagaimana buruh migran perempuan kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pemberi kerja, seperti adanya tindak kekerasan hingga eksploitasi. Dari gambar di atas, tidak sedikit media *online* yang menggunakan diksi “kisah pilu” sebagai pemilihan judul pada pemberitaan buruh migran perempuan. Penggunaan frasa tersebut menjadi salah satu bentuk eksploitasi perempuan dalam praktik media agar membuat pembaca menjadi lebih tertarik untuk membaca berita tersebut karena menimbulkan simpati belaka dalam keadaan buruh migran perempuan (Putri, Dianastiti, & Sumarlam, 2023).

Pada dasarnya, media *online* masih memiliki pelbagai catatan dalam

memberitakan isu terkait buruh migran perempuan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas media *online* dalam pemberitaan terkait buruh migran perempuan, penulis tertarik untuk melihat hal tersebut dengan menggunakan konsep jurnalisme perspektif gender.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah, yakni mengetahui bagaimana media *online* mengimplementasikan jurnalisme perspektif gender terhadap pemberitaan buruh migran perempuan.

KERANGKA TEORETIS

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori Pers Tanggung Jawab Sosial. Teori ini merupakan salah satu teori normatif yang menjelaskan terkait idealisme media dalam beroperasi dengan menerapkan sistem dan nilai-nilai sosial tertentu serta merupakan standar yang harus digunakan masyarakat untuk menilai kinerja media di Amerika Serikat (Barran, 2019).

Teori pers tanggung jawab sosial dimuat dalam pembicaraan mengenai falsafah pers yang terkandung dalam *Four Theories of Press* yang ditulis oleh Siebert, Peterson, dan Schramm pada tahun 1956. Adapun pers tanggung jawab sosial sendiri berkembang setelah adanya *authoritarian theory* dan *libertarian theory*. Setelah pers tanggung jawab sosial, hadir teori keempat bernama *the soviet communist theory* (Kusumaningrat, 2016).

Sebagai modifikasi dari dua teori sebelumnya, teori pers tanggung jawab sosial menitikberatkan pada peran media yang harus terbebas dari kendali pemerintah. Namun, media tetap harus melayani masyarakat dengan menyerukan operasi industri yang bertanggung jawab dan beretika. Di sisi lain, masyarakat tetap perlu mengkritisi dan mengembangkan penilaian yang tegas terhadap media (Barran, 2019).

Etika Jurnalistik

Dalam konteks jurnalistik, etika menjadi suatu pondasi yang penting bagi insan pers untuk berkomitmen dalam melakukan sesuatu yang baik dalam batasan etika yang telah disepakati secara universal. Dari hal tersebut, eksistensi kode etik jurnalistik menjadi hal signifikan yang ada untuk menjadi panduan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik jurnalistik pada dasarnya perlu ditaati oleh jurnalis sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik guna menegakkan integritas serta profesionalisme (Dewan Pers, 2013).

Dalam konteks pemberitaan buruh migran perempuan, kode etik yang memiliki relevansi yang signifikan adalah kode etik pada pasal 4, 5, dan 8. yang akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Dewan pers (2013) mengidentifikasi pelanggaran pasal 4 pada beberapa butir, seperti bohong yang merujuk pada hal yang tidak sesuai fakta, fitnah yang berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan sengaja dengan niat buruk, sadis merujuk pada kejam dan tidak mengenal belas kasihan, cabul yang berarti penggambaran tingkah laku melalui foto, gambar, grafis, dan tulisan yang bersifat erotis, serta pengharusan jurnalis untuk menyertakan waktu pengambilan gambar dan suara sebagai arsip. Pasal ini memiliki relevansi dengan jurnalisme perspektif gender dimana dalam salah satu indikator yang dituangkan pada *A Gender Balance Guide for Media* dari *Women in News* (2020) terkait dengan foto, grafis, dan penggunaan bahasa yang baik untuk liputan yang sensitif terhadap keberimbangan gender. Dalam konteks penggunaan visual, seperti foto dan infografis, laporan tersebut menyarankan agar media tidak menggunakan bahasa atau foto yang menurunkan derajat perempuan dengan penggunaan objek seksual atau stereotip ekstrim serta penggunaan foto yang menampilkan

fitur dari tubuh perempuan, seperti belahan dada, selulit, dan keriput.

B. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Dewan pers mengidentifikasi identitas sebagai segala bentuk informasi yang menyangkut diri seseorang dan memberikan kemudahan bagi orang lain untuk melacak. Hal ini menjadi sesuatu yang rentan dilanggar oleh media, terlihat dari bagaimana hal ini masih menjadi hal yang kerap dijumpai dalam praktik media pada berbagai bentuk eksposur identitas korban kejahatan susila oleh media massa (Mony & Megawati, 2021). Adapun identitas yang kerap diekspos ialah domisili, pekerjaan, foto atau gambar diri orang terdekat maupun gambar korban itu sendiri. Dengan demikian, tugas wartawan untuk melindungi identitas korban masih dinilai luput.

C. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Jurnalisme Perspektif Gender

Jurnalisme perspektif gender adalah praktik jurnalisme yang memperjuangkan kesetaraan gender guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan merata (Dhewy et al., 2024). Dengan demikian, praktik jurnalistik ini diterapkan untuk menciptakan kesetaraan antar seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki, perempuan, minoritas seksual, minoritas agama, kelompok difabel, hingga kelompok adat tertentu.

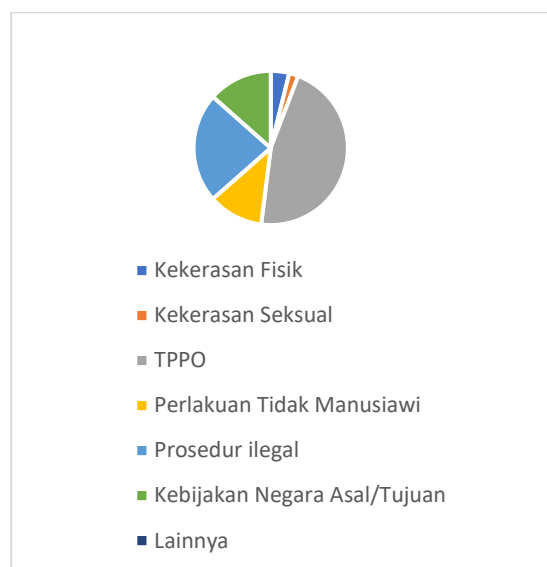
Praktik tersebut hadir beriringan dengan fakta bahwa posisi perempuan kemudian semakin rentan dan lemah dengan ketidakberpihakan media pada perempuan. Padahal, media memiliki fungsi penting untuk membentuk persepsi masyarakat melalui proses konstruksi sosial (Vu et al., 2018).

Tak hanya itu, hal tersebut juga hadir sebagai dampak dari banyaknya pemberitaan oleh media yang masih bias gender. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kecenderungan media dalam mengobjektifikasi korban, menonjolkan personalisasi korban sebagai pemicu kekerasan, dan penggunaan diksi yang tidak sensitif gender, seperti diksi diperkosa, ditiduri, dianiaya, dan lainnya. Ada pula sandingan kata terhadap perempuan, seperti gadis muda, gadis lugu, dan gadis janda yang mencerminkan adanya kesan bahwa perempuan ditempatkan pada kondisi tidak berdaya dan dirugikan (Laksono & Zakiyah, 2023).

Jika media tidak mampu menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dan terus melanggengkan stereotip kepada pekerjaan, peran, dan atribut mereka, media hanya akan melanggengkan kesenjangan gender (Zausmer & Flueckiger, 2020). Kesenjangan gender tersebut hingga saat ini masih terlihat dari bagaimana media menampilkan proposisi perempuan lebih sedikit daripada laki-laki dalam pemberitaan, bagaimana posisi pemberitaan perempuan yang masih ditemukan sebagai objek dibandingkan subjek.

Subono (dalam Sunarto, 2016) melihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jurnalisme sensitif gender dan jurnalisme objektif. Perbedaan ini terdapat pada jurnalisme objektif yang menitikberatkan pada proses dalam melihat fakta yang diatur oleh hukum dan kaidah yang berlaku secara universal. Model jurnalisme ini cenderung menjaga independensi dan keberimbangan dengan menghindari keberpihakan (Latief & Azis, 2019). Sementara itu, jurnalisme perspektif gender melihat adanya dominasi kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang erat dalam kehidupan masyarakat sebagai hasil dari ketidaksetaraan dan keadilan gender yang kerap dialami perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Tabel Distribusi topik pemberitaan terkait buruh migran perempuan

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1	Kekerasan Fisik	2	3.2%
2	Kekerasan Seksual	1	1.6%
3	TPPO	24	38.1%
4	Perlakuan tidak manusiawi	6	9.5%
5	Prosedur ilegal	12	19%
6	Kebijakan negara asal/tujuan	7	11.1%
7	Lainnya	11	17.5%
TOTAL		63	100%

Data tersebut menampilkan distribusi topik pemberitaan terkait buruh migran perempuan berdasarkan jumlah dan persentase. Dari tabel tersebut, topik "TPPO" (Tindak Pidana Perdagangan Orang) mendominasi dengan jumlah 24 berita atau 38.1% dari total pemberitaan. Ini menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap isu perdagangan orang dalam konteks buruh migran perempuan, mengindikasikan bahwa ini adalah masalah kritis yang sering diangkat oleh media.

Topik "Prosedur ilegal" menempati posisi kedua dengan 12 berita (19%), menunjukkan adanya kekhawatiran yang cukup besar terhadap ketidakpatuhan

terhadap prosedur resmi dalam penanganan buruh migran. Ini mungkin mencakup isu-isu seperti pemalsuan dokumen atau perekrutan ilegal yang berisiko bagi buruh migran perempuan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai buruh migran perempuan berfokus pada berbagai isu kritis, dengan penekanan khusus pada perdagangan orang dan prosedur ilegal. Ini menggambarkan tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh buruh migran perempuan dan menunjukkan area-area di mana perlindungan dan perhatian lebih lanjut sangat diperlukan. Interpretasi ini relevan dalam konteks penelitian untuk memahami bagaimana media menangani isu-isu buruh migran perempuan dan seberapa besar perhatian yang diberikan terhadap setiap topik.

Judul Berita

Yusuf (2013) mengelaborasi tiga dimensi dari liputan pemberitaan sensasionalisme yang terdiri dari personalisasi, emosionalisme, dan dramatisasi. Dalam unit analisis ini, penulis juga mengkombinasikan indikator pemberitaan yang berperspektif gender dengan mengacu pada kode etik jurnalistik pasal 5,6, dan 8 yang kemudian penulis kategorikan ke dalam bentuk judul yang mengandung diksi personalisasi, diksi stereotip, diksi emosionalisme, dan diksi provokatif.

a. Berita memuat judul dengan diksi yang mengandung unsur personalisme

Kategori ini menunjukkan apakah judul berita memuat salah satu aspek sensasionalisme dengan menggunakan diksi yang mengandung unsur personalisme. Unsur personalisme yang ditekankan dalam pemberitaan menekankan aspek individu buruh migran perempuan, seperti penyebutan diksi “telantar”, “minta pulang”, “dibunuh karena sering marah”, “kabur dari majikan”, “betah tidak pulang”, atau “keluarga yang diancam”.

Dari total 63 artikel, sebanyak 48 artikel berita (76,2%) tidak menuliskan judul yang mengandung diksi personalisasi. Sementara, 15 artikel (23,8%) mengandung diksi

personalisasi.

b. Berita memuat judul dengan diksi yang mengandung unsur emosionalisme

Kategori ini menunjukkan apakah judul berita memuat salah satu aspek sensasionalisme dengan menggunakan diksi yang mengandung unsur emosionalisme. Sebuah judul berita dikatakan mengandung unsur emosionalisme apabila jurnalis lebih menonjolkan aspek emosi daripada aspek rasional dan logis dalam pemberitaan untuk menarik simpati para pembaca melalui penggunaan diksi “TKW menangis”, “kisah pilu...”, “tragis”, dan sebagainya.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frekuensi	Percentage	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	45	71.4	71.4	71.4
	Y	18	28.6	28.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 45 artikel berita (71,4%) tidak menuliskan judul yang mengandung diksi emosionalisme. Sementara, 18 artikel (28,6%) mengandung diksi emosionalisme.

c. Berita memuat judul dengan diksi yang mengandung unsur stereotip

Kategori ini menunjukkan apakah judul berita memuat salah satu aspek sensasionalisme dengan menggunakan diksi yang mengandung unsur stereotip. Sebuah judul berita dikatakan mengandung unsur stereotip apabila menyertakan diksi yang menimbulkan adanya prasangka yang negatif serta generalisasi tidak adil terhadap buruh migran perempuan melalui penyematan kata-kata, seperti “TKW ilegal”, “PMI ilegal”, “tersangka perempuan”, “perempuan ilegal”, “dijual”, “dijadikan PSK” dan sebagainya.

		Frequency	Percent
Valid	T	36	57.1
	Y	27	42.9
Total		63	100.0

Dari total 63 artikel, sebanyak 36 artikel berita (57,1%) tidak menuliskan judul yang mengandung diksi stereotip. Sementara, 27 artikel (42.9%) mengandung diksi stereotip.

d. Berita memuat judul dengan diksi yang mengandung unsur provokatif

Kategori ini menunjukkan apakah judul berita memuat salah satu aspek sensasionalisme dengan menggunakan diksi yang mengandung unsur provokatif. Sebuah judul berita dikatakan mengandung unsur provokatif apabila menggunakan kalimat panjang dalam headline, penggunaan kata-kata, seperti “wow”, “astaga”. “ternyata”, “yuk”, “mengejutkan” disertai dengan penggunaan tanda baca “!” atau “?” dalam rangka mengeksploitasi celah keingintahuan pembaca.

		Frequency	Percent
Valid	T	58	92.1
	Y	5	7.9
Total		63	100.0

Dari total 63 artikel, sebanyak 58 artikel berita (92,1%) tidak menuliskan judul yang mengandung diksi provokatif. Sementara, 5 artikel (7.9%) mengandung diksi yang provokatif.

Setelah dipaparkan persentase untuk setiap kategori, berikut adalah persentase untuk elemen diksi pada judul berita.

Tubuh Berita

Dalam elemen ini, penulis akan menganalisis beberapa aspek yang merujuk pada kode etik jurnalistik pasal 1,5, dan 8 dengan melihat kesesuaian antara judul dan isi berita, melihat konten berita yang berpegang pada hak korban untuk mendapatkan jaminan perlindungan privasi yang terdiri dari hal-hal pribadi, seperti penyebutan SARA, masa lalu, status sosial, status pernikahan, atribut fisik, informasi pribadi, hingga informasi terkait keluarga.

a. Berita memuat kesesuaian antara judul dan isi

Kategori ini menunjukkan apakah berita memuat kesesuaian antara judul dengan isi berita. Hal ini mengacu pada kode etik jurnalistik pasal 1 yang menyinggung bahwa jurnalis perlu menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Luputnya jurnalis pada ketiga hal tersebut dapat berindikasi pada ketidaksesuaian judul dan isi berita yang tidak akurat sehingga menyesatkan pembaca dengan praktik pembuatan judul yang mengedepankan sensasionalisme.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Y	63	100.0	100.0	100.0
	Total	63	100.0	100.0	100.0

Dari 63 berita, seluruh berita (100%) memiliki kesesuaian antara judul dan isi berita.

b. Berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan SARA

Kategori ini menunjukkan apakah berita menuliskan informasi yang menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dapat diindikasikan dengan penyebutan atribut keagamaan yang tidak relevan dengan isi berita, pengasosiasian buruh migran perempuan dengan suku, agama, dan ras tertentu yang tidak relevan dengan isi berita.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	61	96.8	96.8	96.8
	Y	2	3.2	3.2	100.0
Total		63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 61 artikel berita (96.8%) tidak menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA), Sementara, 2 artikel (3.2%) menyinggung.

c. Berita menuliskan hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan menyinggung masa lalu buruh migran perempuan yang tidak relevan dengan pemberitaan

Kategori ini menunjukkan apakah berita menuliskan informasi yang menyinggung hal-hal pribadi dengan menyinggung masa lalu yang tidak memiliki relevansi dengan topik pemberitaan. Adapun hal ini dapat berupa informasi kehidupan masa lalu perempuan sebelum menjadi buruh migran perempuan hingga informasi terkait kehidupan asmara.

		Frequency	Percent
Valid	T	60	95.2
	Y	3	4.8
	Total	63	100.0

Dari total 63 artikel, sebanyak 60 artikel berita (96.8%) tidak menuliskan hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan menyinggung masa lalu buruh migran perempuan yang tidak relevan dengan pemberitaan, Sementara, 3 artikel (4.8%) menyinggung.

d. Berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan status pernikahan buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apakah berita menuliskan informasi yang menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan status pernikahan buruh migran perempuan melalui penulisan diksi “cerai”, “janda”, “duda”, “istri dari...” atau “suami dari...” yang tidak relevan dengan pemberitaan.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	T	58	92.1	92.1
	Y	5	7.9	7.9
	Total	63	100.0	100.0

Dari total 63 artikel, sebanyak 58 artikel berita (92.1%) tidak menuliskan hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan

menyinggung status pernikahan buruh migran perempuan Sementara, 5 artikel (7.9%) menyinggung.

e. Berita menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan menyebutkan status sosial buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apakah berita menuliskan informasi yang menyinggung hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan penyebutan status sosial buruh migran perempuan melalui diksi “miskin”, “kelas rendah”, “kelas bawah”.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	62	98.4	98.4	98.4
	Y	1	1.6	1.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 62 artikel berita (98.4%) tidak menuliskan hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan menyebutkan status sosial buruh migran perempuan. Sementara, 1 artikel (1.6%) menyinggung.

f. Berita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan atribut fisik buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apakah berita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan atribut fisik buruh migran perempuan apabila berita mendeskripsikan atribut fisik berupa penampilan, bentuk badan, paras, hingga mendeskripsikan luka fisik secara spesifik.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	58	92.1	92.1	92.1
	Y	5	7.9	7.9	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 58 artikel berita (92.1%) tidak menuliskan hal-hal pribadi buruh migran perempuan dengan menyebutkan status sosial buruh migran

perempuan. Sementara, 5 artikel (7.9%) menyinggung.

g. Berita memuat foto yang menunjukkan atribut fisik buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apakah berita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan atribut fisik buruh migran perempuan apabila berita mencantumkan atribut fisik berupa foto uruh migran perempuan, seperti wajah tanpa disensor, foto yang bernuansa sensual, foto berupa luka fisik yang tidak disensor.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	T	46	73.0	73.0
	Y	17	27.0	27.0
	Total	63	100.0	100.0

Dari total 63 artikel, sebanyak 46 artikel berita (73.0%) tidak memuat atribut fisik buruh migran perempuan. Sementara, 17 artikel (27.0%) memuat.

h. Berita membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman

Kategori ini menunjukkan apakah berita membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman apabila berita menekankan adanya potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh buruh migran perempuan dengan pemberitaan bernada negatif. Adapun berita membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman apabila berita menekankan buruh migran perempuan sebagai pencuri lapangan kerja, pengurus perekonomian, pengancam sistem imigrasi, pengancam keamanan masyarakat, pengancam kesehatan masyarakat, ancaman karena seksualitas, ancaman karena berasal dari luar negeri, serta ancaman karena ras.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	T	62	98.4	98.4
	Y	1	1.6	1.6
	Total	63	100.0	100.0

Dari total 63 artikel, sebanyak 62 artikel berita (98.4%) tidak membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman.

Sementara, 1 artikel (1.6%) membingkai buruh migran perempuan sebagai ancaman.

i. Berita menyebutkan informasi pribadi buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apabila berita mencantumkan data pribadi buruh migran perempuan apabila menuliskan alamat, nama lengkap, tempat tinggal, alamat bekerja, hingga media sosial buruh migran perempuan.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	46	73.0	73.0	73.0
	Y	17	27.0	27.0	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 46 artikel berita (73.0%) tidak menyebutkan informasi pribadi buruh migran perempuan. Sementara, 17 artikel (27.0%) memuat.

j. Berita menyebutkan informasi terkait keluarga inti dan kerabat buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apabila berita mencantumkan informasi terkait keluarga inti dan kerabat buruh migran perempuan apabila berita menuliskan nama lengkap, tempat tinggal, alamat bekerja, hingga media sosial keluarga dan kerabat buruh migran perempuan.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	54	85.7	85.7	85.7
	Y	9	14.3	14.3	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 54 artikel berita (85.7%) tidak menyebutkan informasi terkait keluarga inti dan kerabat buruh migran perempuan. Sementara, 9 artikel (14.3%) memuat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas berita dalam penelitian ini sudah mengimplementasikan atau

mengimplementasikan sebagian Komitmen Etika Jurnalisme. Namun, masih ada beberapa topik yang perlu perhatian lebih, terutama dalam memastikan semua topik berita dapat mengimplementasikan KEJ sepenuhnya untuk menjamin kualitas dan etika jurnalistik yang tinggi.

Penggunaan Diksi

Media masih memberikan judul dan menyematkan diksi yang menyebabkan stigmatisasi pada buruh migran perempuan terutama yang menjadi korban kekerasan dan korban perdagangan orang (Luviana, 2021). Hal ini mengindikasikan adanya pemberitaan yang kurang ramah terhadap perempuan akibat minimnya pemahaman jurnalis mengenai situasi faktual yang dihadapi buruh migran perempuan. Adapun evaluasi penggunaan diksi pada pemberitaan mengenai buruh migran perempuan dikategorikan menjadi tiga, yakni diksi yang mengandung stigmatisasi, stereotip, labelisasi, dan diksi netral atau yang tidak mengandung ketiganya.

a. Berita memuat diksi yang mengandung stereotip terhadap buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apabila berita memuat diksi yang mengandung stereotip terhadap buruh migran perempuan yang meliputi penggunaan kata “ilegal”, “dijual”, dan “dipaksa” pada buruh migran perempuan.

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	T	30	47.6	47.6
	Y	33	52.4	52.4
	Total	63	100.0	100.0

Dari total 63 artikel, sebanyak 30 artikel berita (47.6%) tidak memuat diksi yang mengandung stereotip. Sementara, 33 artikel berita (52.4%) memuat diksi yang mengandung stereotip.

3.2.3.2 Berita memuat diksi yang mengandung labelisasi terhadap buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apabila berita memuat diksi yang mengandung labelisasi melalui pendeskripsian korban dengan label negatif.

Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	55	87.3	87.3	87.3
	Y	8	12.7	12.7	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 55 artikel berita (87.3%) tidak memuat diksi yang mengandung labelisasi. Sementara, 8 artikel berita (12.7%) memuat diksi yang mengandung labelisasi.

b. Berita memuat diksi yang netral terhadap buruh migran perempuan

Kategori ini menunjukkan apabila berita tidak menyertakan diksi yang mengandung stereotip dan labelisasi.

3.2.3.3.1 Tabel persentase berita berdasarkan kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	T	33	52.4	52.4	52.4
	Y	30	47.6	47.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Dari total 63 artikel, sebanyak 33 artikel berita (52.4%) tidak memuat diksi yang netral. Sementara, 30 artikel berita (47.6%) memuat diksi yang netral.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hampir setengah dari berita yang dianalisis telah menggunakan diksi berperspektif gender, namun masih ada sejumlah berita yang hanya sebagian atau belum sama sekali menerapkan perspektif ini. Temuan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam integrasi perspektif gender dalam pemberitaan. Meskipun demikian, temuan ini juga menyoroti bahwa media perlu untuk lebih konsisten dalam penggunaan diksi yang berperspektif gender, terutama pada topik-

topik yang sensitif seperti TPPO dan Kekerasan Seksual.

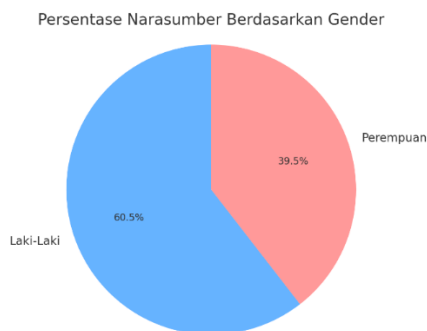
3.2.4 Narasumber

3.2.4.1 Tabel persentase berita berdasarkan kategori

Narasumber	Jumlah	Persentase
Buruh Migran Perempuan sebagai Korban	6	7.9%
Buruh Migran Perempuan sebagai Pelaku	2	2.6%
Pihak Lembaga Penegak Hukum dan HAM Perempuan	5	6.6%
Pihak Lembaga Penegak Hukum dan HAM Laki-Laki	34	44.7%
Aktifis Perempuan	4	5.3%
Aktifis Laki-Laki	1	1.3%
Lainnya, Perempuan	13	17.1%
Lainnya, Laki-Laki	11	14.5%
TOTAL	76	100%

Tabel persentase di atas menyajikan distribusi berita berdasarkan kategori narasumber yang terlibat dalam pemberitaan. Dari total 76 berita yang dianalisis, mayoritas narasumber berasal dari pihak lembaga penegak hukum dan HAM laki-laki, mencapai 44.7%. Ini menunjukkan dominasi peran laki-laki dari lembaga-lembaga tersebut dalam konteks pemberitaan yang dipelajari. Selanjutnya, narasumber perempuan yang termasuk dalam kategori "Lainnya" menyumbang sebesar 17.1%, sedangkan narasumber laki-laki dalam kategori yang sama mencapai 14.5%. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman dalam narasumber di luar konteks lembaga penegak hukum dan HAM, dengan narasumber perempuan sedikit lebih banyak daripada

narasumber laki-laki dalam kategori tersebut. Sementara itu, narasumber yang berasal dari buruh migran perempuan sebagai korban dan pelaku masing-masing menyumbang 7.9% dan 2.6% dari total berita, menandakan bahwa narasi mengenai buruh migran perempuan cukup signifikan dalam pemberitaan yang diamati. Namun, narasumber aktivis perempuan dan laki-laki masing-masing hanya menyumbang 5.3% dan 1.3%, menunjukkan peran relatif kecil dalam konteks pemberitaan yang diselidiki. Dari interpretasi ini, dapat disimpulkan bahwa narasumber laki-laki, terutama dari lembaga penegak hukum dan HAM, mendominasi narasi dalam berita, sementara eksistensi keberagaman narasumber perempuan masih perlu diperhatikan lebih lanjut.



3.2.4.2 Diagram persentase narasumber berita berdasarkan jenis kelamin

Data ini mengungkapkan bahwa narasumber perempuan menyumbang 39.5% dari total narasumber yang terlibat dalam pemberitaan, sementara mayoritas narasumber ialah laki-laki mencapai persentase 60.5%. Sejalan dengan data sebelumnya, kita dapat melihat bahwa narasumber perempuan dalam kategori yang sama (pihak lembaga penegak hukum dan HAM) mungkin tidak seimbang dengan proporsi narasumber laki-laki. Meskipun narasumber perempuan dari kategori "Lainnya" memiliki kontribusi yang signifikan sebesar 17.1%, masih terdapat kesenjangan antara proporsi narasumber perempuan dan laki-laki secara keseluruhan.

Dari interpretasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun narasumber perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam kategori "Lainnya", peran dan keterwakilan mereka masih terbatas, terutama dalam konteks lembaga penegak hukum dan HAM. Ini

menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperluas peran dan keterwakilan narasumber perempuan dalam berita, terutama dalam konteks yang secara tradisional didominasi oleh narasumber laki-laki.

3.3 Implementasi Indikator Jurnalisme Perspektif Gender

Berdasarkan paparan di atas, berikut ini dipaparkan bagaimana implementasi setiap indikator jurnalisme perspektif gender secara keseluruhan pada pemberitaan buruh migran perempuan di media online.

	Judul Berita	Tubuh Berita	Penggunaan Diksi Berita
Mengimplementasikan seluruh indikator JPG	18 28.6%	33 52.4%	30 47.65%
Mengimplementasikan sebagian indikator JPG	39 61.9%	29 46.0%	25 39.7%
Tidak mengimplementasikan indikator JPG	6 9.5%	1 1.6%	8 12.7%
Total	63 100%	63 100%	63 100%

Data tersebut menunjukkan distribusi implementasi indikator Jurnalisme Berperspektif Gender (JPG) dalam berbagai komponen berita, yakni judul berita, tubuh berita, dan penggunaan diksi berita.

Dalam komponen judul berita, sebanyak 18 berita (28.6%) telah mengimplementasikan seluruh indikator JPG. Sebaliknya, 39 judul berita (61.9%) hanya mengimplementasikan sebagian indikator JPG, dan 6 judul berita (9.5%) sama sekali tidak mengimplementasikan indikator JPG. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas berita telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip JPG, namun masih ada beberapa yang belum sepenuhnya mengadopsi indikator ini dalam judul beritanya.

Ketika melihat pada tubuh berita, sebanyak 33 berita (52.4%) telah

mengimplementasikan seluruh indikator JPG, sedangkan 29 berita (46.0%) hanya mengimplementasikan sebagian indikator. Terdapat satu berita (1.6%) yang sama sekali tidak mengimplementasikan indikator JPG. Ini mengindikasikan bahwa tubuh berita cenderung lebih sering memenuhi standar JPG dibandingkan judul berita, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian yang ingin melihat implementasi dari jurnalisme perspektif gender pada pemberitaan buruh migran perempuan di media online telah tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, penulis melakukan proses coding dengan satu orang coder dengan memeriksa kualitas data menggunakan uji reliabilitas Holsti dengan skor minimal 0,7 atau 70%. Dari hasil penelitian yang ingin melihat proporsi diksi sensasional pada judul berita, proporsi tubuh berita yang telah memenuhi kode etik jurnalistik, Proporsi penggunaan diksi pada tubuh berita, dan proporsi narasumber perempuan dan laki-laki dalam pemberitaan, diketahui bahwa secara keseluruhan, elemen judul berita terlihat telah mengimplementasikan sebagian indikator jurnalisme perspektif gender dengan persentase sebesar 61.9%. Kemudian, elemen tubuh berita telah mengimplementasikan seluruh indikator jurnalisme perspektif gender dengan persentase sebesar 52.4%, dilanjutkan dengan elemen penggunaan diksi berita yang telah mengimplementasikan seluruh indikator jurnalisme perspektif gender dengan persentase sebesar 47.65%. Pada variabel narasumber, diketahui bahwa pemberitaan terkait buruh migran perempuan mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 60.5% dan perempuan yang mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 39.5%. Pada narasumber laki-laki, ditemukan bahwa mayoritas laki-laki yang menjadi narasumber ialah laki-laki yang tergabung dalam pihak lembaga penegak Hukum dan HAM. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa media online masih belum mengimplementasikan seluruh indikator dari jurnalisme perspektif gender.

REKOMENDASI

Dari penelitian ini, penulis menyarankan agar media dapat lebih meningkatkan konsistensinya dalam menerapkan setiap indikator jurnalisme perspektif gender pada setiap elemen pemberitaan. Tak hanya itu, media perlu berupaya dalam meningkatkan pemahaman kognitif para jurnalis untuk mempelajari etika dan kaidah dalam memberitakan pemberitaan buruh migran perempuan yang berperspektif gender melalui pelatihan. Adapun media harus lebih berhati-hati dalam memilih diksi yang tidak menimbulkan stereotip atau label negatif terhadap buruh migran perempuan. Selain itu, penting bagi media untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi narasumber perempuan, khususnya dalam pemberitaan yang menyangkut buruh migran perempuan, guna mencerminkan keberagaman dan memberikan perspektif yang lebih inklusif. Media juga perlu meningkatkan peliputan terkait kebijakan dan informasi yang relevan bagi calon buruh migran perempuan, sebagai upaya preventif terhadap kasus-kasus TPPO dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. BP2MI.
- Baran, S. (2019). *Introduction to Mass Communication (Tenth Edition)*. McGraw-Hill Education.
- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2016). *Mass communication theory*
- D'Heer, J., Vergotte, J., De Vuyst, S., & Van Leuven, S. (2020). The bits and bytes of gender bias in online news: a quantitative content analysis of the representation of women in Vice. com. *Feminist Media Studies*, 20(2), 256-272.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2016). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya
- Laksono, P., & Zakiyah, L. A. (2023). Gender Sensitive Journalism; The Role of Magdalene *Online Media* in Campaigning for Gender Issues. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 262-276.
- Latief, R., & Azis, F. (2019). Penerapan Jurnalisme Berperspektif Gender dalam Berita Prostitusi *Online Vanessa Angel* di Detik. com. *Jurnal Jurnalisa*, 5(2).
- Rustanta, A. (2016). KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP BURUH MIGRAN. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 1(1), 5–9.
- Westerståhl J. (1983), "Objective News Reporting: General Premises," *Communic. Res.*, vol. 10, no. 3, p. 405. Wiley & Sons.
- Wolf, N. (2013). *Fire with fire: New female power and how it will change the twenty-first century*. Random House.
- Yayasan Bakti. (2017). *Kerentanan Buruh migran perempuan pada Ketidakadilan Gender*. Yayasan Bakti.
- Byerly, C. M., & Ross, K. (2008). *Women and media: A critical introduction*. John